PERAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSERO TERBATAS(Studi Kasus di Kantor Notaris / PPAT Fahmi Amalyah, SH., M.Kn.)**Oleh****Veronika Chika Harin Astuti¹, Susilowardani², Novita Alfiani³****^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta****Email: 1veronikachikaha@gmail.com**

Article History:*Received: 01-05-2023**Revised: 11-05-2023**Accepted: 24-05-2023***Keywords:***Peran Notaris, Akta**Pendirian Persero Terbatas*

Abstract: *Seiring perkembangan perekonomian, menimbulkan dampak perkembangan berbagai jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput dari adanya campur tangan pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri, juga diharapkan agar terpenuhi kewajiban membayar pajak serta menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan perekonomian, menimbulkan dampak perkembangan berbagai jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput dari adanya campur tangan pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri, juga diharapkan agar terpenuhi kewajiban membayar pajak serta menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.¹ Kata "perseroan" menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata "terbatas" menunjuk pada pertanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara. Campur tangan pemerintah adalah mengharuskan adanya wajib

---

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 1

daftar bagi suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiap orang dimana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat pendaftaran yang telah disediakan pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dapat diketahui secara umum. Bentuk usaha yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang disebut juga sebagai perseroan terbatas.² Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam laulintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karena itu, perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *personastandi in judicio*. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa *atau natural person* atau *naturliijke person*, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.³

Pasal 2.64.1 NBW (BW Belanda yang baru) mendefinisikan NV sebagai: "Badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor".⁴ Nama asli dari PT (Perseroan Terbatas) adalah Naamloze Vennotschap yang disingkat NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD. Dalam pengembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan.

Di Indonesia Menurut Rudy Prasetyo, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menampilkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham). Perseroan, artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 (1) UUPT.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: ⁵ "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru "lahir", maka sebagai "*artificial persoon*" atau "*persoon in law*" yang merupakan "orang" dalam pengertian hukum, di perlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.

---

² Tesis: Devie Lambe, 2011, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT*. Universitas Indonesia, Hal.1.

³ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni..

⁴ Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan: Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Cet ke-1 Yogyakarta: Penerbit Pusaka Yustisia, Hal. 6.

⁵ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, hal.17

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat karya ilmiah ini yang berjudul Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berlokasi di Kantor Notaris/PPAT Fahmi Amalyah, SH., M.Kn.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang menjadi kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawab sebagai Notaris?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum mengenai Pendirian Perseroan Terbatas serta aspek hukum yang berkaitan dengan Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan Peran dan Tanggung Jawabnya sebagai Notaris.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, sumbangan dan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai prosedur dan tata cara pendirian Perseroan Terbatas dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendiriannya. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN 2014 berbunyi: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta autentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris.⁶

Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya

---

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, cet. 2, hal. 17.

tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik dapat di lihat di dalam ketentuan Pasal 1868

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.

3. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan usaha yang sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan setatus badan hukum tersebut, PT mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri. Harta pemegang saham, Direktur dan /atau Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan/atau kreditor perseroan.⁷

4. Tujuan Perseroan Terbatas

Pasal 2 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar bersifat imperatif, dilakukan bersama pada saat pembuatan Akta Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggariskan, Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan. Jadi, penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, bersifat imperatif. Lebih lanjut sifat imperatif tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 (1) huruf c yang menyatakan, untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan
2. Jangka waktu berdirinya perseroan
3. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan

Sumber Hukum Perseroan Terbatas

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

---

⁷ Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, cet.2, (Jakarta: Forum Sahabat), hal.2-3

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁸

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di Kantor Notaris/PPAT Fahmi Amalyah, SH., M.Kn. yang terletak dikabupaten Karanganyar.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data dengan cara melihat kegiatan secara langsung dilapangan yang akan dibahas berdasarkan Studi Kepustakaan (*library research*).

4. Tehnik Analisa Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto "Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata". Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris. Yang kemudian diajukan permohonan Pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris, UUPT tersebut secara spesifik mengatur tentang Perseroan Terbatas khususnya mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas, pendirian suatu Perseroan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi.

- a. Perseroan yang seluruh dahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Tugas Notaris adalah membuat Akta, menyimpan dan menerbitkan salinan (*grosse*). Notaris juga mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat dan dialami serta mencatatnya dalam Akta. Adapun wewenang utama Notaris adalah membuat Akta Otentik. Menurut G.H.S. Luban Tobing bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Akta Otentik adalah :⁹ Akta itu harus dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum; Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam UU; Pejabat umum atau oleh siapa Akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk Akta itu.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hal. 280.

⁹ G.H.S. Luban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Erlangga, Jakarta. Hal.9

Upaya Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Melakukan Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya Notaris sering kali menghadapi masalah-masalah yang menghambat Peran dan Tanggung Jawabnya, hal ini dikarenakan Notaris hanya diamanahi oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, membuat Akta Autentik yang di minta oleh para penghadap dan diamanahkan undang-undang tanpa harus melakukan peninjauan lapangan.

Setiap orang yang datang pada Noataris untuk meminta jasa Notaris tersebut atau yang dalam hal ini sering disebut klien, maka Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolaknya. Pasal 16 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris "memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk menolaknya." Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang .

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya kedalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: "tidak kurang hati-hati". Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPperdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJN. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJN. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau diahadapannya.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggung jawaban Notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggung jawaban Notaris secara perdata ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut

1. Sebuah pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pendiriannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia", sebagaimana bunyi pasal tersebut harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, ini artinya perseroan tidak boleh didirikan oleh seorang saja. Selain yang sudah disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas bahwa pendirian PT harus dengan Akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Dari awal pada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadap kehadiran Notaris, mulai saat itulah Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang di mohonkan menghadap dan diperintahkan undang-undang, dalam hal ini pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas dari awal hingga Pengumuman atau Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab Notaris.
2. Dalam menjalankan Peran dan Tanggung Jawabnya memang Notaris sering kali masih mendapatkan hambatan-hambatan, baik itu hambatan secara teknis dan/atau non-teknis, hingga hambatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab (para menghadap dengan itikad tidak baik). Notaris masih sering kali disangka telah berbuat tidak sesuai undang-undang.

SARAN

1. Sebaiknya Para Notaris diberikan pelatihan keahlian dalam membaca gerak-gerik seseorang (membaca gestur), demi mencegah hambatan-hambatan yang akan mengganggu peran Notaris dikemudian hari karena itikad tidak baik para penghadap.
2. Dari semua kewenangan yang diberikan kepada Notaris ada perlunya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari itikad tidak baik penghadap, selain kewenangan memeriksa berkas para penghadap Notaris diberi kewenangan untuk meninjau langsung lapangan Perseroan Terbatas yang akan didirikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.Qirom Syamsuddin Meliala, 2005, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Liberty..
- [2] Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, cet. 2, Yogyakarta: UII Press.
- [3] Abdul Manan, 2006 *Aspek-aspek pengubah Hukum*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 4
- [5] Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [6] Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Profesi Notaris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [7] C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- [8] G. H. S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, Jakarta: Erlangga.
- [9] Gatot Wardoyo, 1992, *Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Gramedia, Jakarta.
- [10] H.M. Arba, 2017, *Hukum Indonesia Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama), (Selanjutnya disebut Buku II).
- [12] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [13] Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- [14] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2.
- [15] Menurut Fuady, 2005, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [16] Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Kesepuluh, Jakarta: Kencana.
- [17] Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, cet. 1, Jakarta: Softmedia.
- [18] R. Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- [19] Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung
- [20] Ronny Hanitoyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [21] Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [22] Sjaifurrahman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju.
- [23] Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- [24] Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty.
- [25] Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.

- [26] Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing.
- [27] Sugiarto, Dergibson, siagian, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- [28] Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, Salatiga: Griya Media.
- [29] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- [30] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
- [32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- [33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- [34] Adriano, Elvia Arcelia Quintana. 2015. *"The Natural Person, Legal Entity or Judicial Person and Juridical Personality."* *Penn State Journal of Law & International Affairs* 383-384.
- [35] Allen, Nicholas. 2012. *"Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice."* *New York Business Law Journal* 37.
- [36] Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. 2020. *"Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja."* *Jurnal Rechtvinding* 92-94.
- [37] Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Blumberg, Phillip. 1968. *"Limited Liability and Corporate Groups."* *Journal of Corporation Law* 577-592.
- [38] Efendi, Aan. 2020. *"Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian untuk Kemudahan Bisnis."* *Veritas et Justitia* 343-365.
- [39] Hart, Karen L., and Anneke Cronje. 2014. *"Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil."* *NACM Credit Congress*. Florida. 3.
- [40] Nugroho, Sandy, and dkk. 2020. *"Implementation of Alter Ego Shareholders and Their Responsibilities According to the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesia."* *International Journal of Innovation* 425.